

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
INTISARI	vi
ABSTRACT	vii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB 2 : KERANGKA TEORI	
2.1 Pengantar	12
2.2 Mutasi Jabatan	13
2.3 Sistem Merit	19
2.4 Pendekatan Jaringan Aktor	21
2.5 Pendekatan Institusional	26
2.6 Kerangka Pikir	31
BAB 3 : METODE PENELITIAN	
3.1 Pengantar.....	33
3.2 Pendekatan Penelitian	33
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.4 Skema Pengumpulan Data	35



3.4.1 Wawancara	36
3.4.2 Dokumentasi	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
3.6 Teknik Validasi Data	40
3.7 Kendala dan Hambatan Penelitian	41
BAB 4 : TATA PEMERINTAHAN ACEH	
4.1 Aceh Sebelum Kemerdekaan	44
4.2 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Perjanjian Helsinki	49
4.2.1 Sejarah GAM	49
4.2.2 Perjanjian Helsinki	51
4.3 Seputar Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).....	53
4.4 Pemerintahan Aceh Sekarang	54
4.4.1 Visi dan Misi	54
4.4.2 Reformasi Birokrasi	58
4.4.3 Seputar Abdi Negara	60
BAB 5 : MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH	
5.1 Pengantar	66
5.2 Peristiwa Sebelum Mutasi.....	67
5.2.1 Kekalahan Zaini dan Pengembalian Kekuasaan	67
5.2.2 Dorongan Mutasi dari Tim Pendopo.....	72
5.2.3 Alasan Transisi dan Tawar-Menawar Jabatan	75
5.3 Kebijakan Mutasi Diputuskan.....	89
5.4 Polemik Pasca Mutasi	85



5.4.1 Pengaduan ke KASN	85
5.4.2 Teguran Mendagri	88
5.4.3 Lobi di Pusat dan Debat Perundangan	90
5.5 Pembahasan	98
5.5.1 Dinamika Hubungan antar Aktor dalam Mutasi.....	98
5.5.2 Celah Aturan Perundangan Pusat dan Daerah	107
 BAB 6 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
7.1 Kesimpulan	114
7.2 Rekomendasi	117
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Aceh masa Zaini Abdullah	4
Tabel 2.1 Instrumen Kelembagaan	28
Tabel 3.1 Detail pengumpulan data	38
Tabel 4.1 Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh	62
Tabel 5.1 Susunan Tim Baperjakat	80
Tabel 5.2 SKPA yang mendapatkan promosi tidak sesuai kompetensi	83
Tabel 5.3 Ringkasan aktor, peran, dan hubungan dalam mutasi	106
Tabel 5.4 Ringkasan argumentasi hukum Gubernur Zaini vs Mendagri	112